

JAPAN FOREIGN POLICY IN COOPERATION WITH INDIA THROUGH ASIA AFRICA GROWTH CORRIDOR (AAGC)

Oleh : Nur Afrillia

nurafrillia.bella@gmail.com

Supervisor: Irwan Iskandar S.IP., MA

Reference: 18 Journals, 1 Official Document, 9 Books, 29 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Economic cooperation is one of the interests of every country that wants to maintain its position in the international political system. Japan and India are no exception. In this study, showed the reasons behind Japan's interest in agreeing to cooperate with India to build partnerships through the Asia Africa Growth Corridor (AAGC) in 2017. AAGC reflects the convergence of bottom-up and top-down processes, which is in the interest of Japanese businesses in using India as a stepping stone to Africa and a desire to provide a geopolitical alternative to the region. These two dimensions need to be considered in analyzing the beginning of the collaboration.

This research is theoretically built using the perspective of neoliberalism, and is supported by foreign policy theory. The formulation of all arguments, data, facts, and theoretical frameworks in this study uses a qualitative explanation method. This study also uses the nation-state as a level of analysis.

The results of this study are that there are three sources of foreign policy that underlie Japan to realize the AAGC as the fulfillment of its country's interests. First, systemic sources explained that the balancing of China's Belt and Road Initiative (BRI) strategy was through Japan's Free and Open Indo-Pacific Strategy. Second, societal sources see India as a stepping stone to the African market. Third, the government source is Shinzo Abe's proactive foreign relations strategy towards India.

Keywords: AAGC, Belt and Road Initiative, Free and Open Indo-Pacific, foreign policy

PENDAHULUAN

Pergeseran besar dalam geografi ekonomi kawasan Asia Pasifik disebabkan oleh globalisasi ekonomi dunia yang pada gilirannya melibatkan peningkatan integrasi dan peningkatan persaingan kawasan. Kedekatan geografis telah menjadi faktor penting yang mendorong perubahan arus ekonomi di kawasan. Meskipun penilaian terhadap prospek kelanjutan pertumbuhan ekonomi Asia secara relatif positif, namun disaat yang bersamaan negara-negara sekitar mempertimbangkan kemungkinan ancaman terhadap pertumbuhan dan stabilitas tersebut.

Potensi untuk konflik terletak pada perbedaan tingkat pertumbuhan, yang mempengaruhi kekuatan relatif negara-negara, dan dalam tingkat saling ketergantungan yang berubah. Ekonomi yang relatif terintegrasi dengan baik dapat berantakan dengan dampak ekonomi dan politik tidak stabil yang terjadi di kawasan. Pada akhirnya, muncul paradoks dalam situasi ini dalam kemungkinan bahwa baik perkembangan ekonomi yang buruk, kehancuran ekonomi regional dan pertumbuhan berkelanjutan yang memacu peningkatan pengeluaran militer, dapat menabur benih konflik. Semua faktor ini menggarisbawahi perlunya kepemimpinan politik yang tegas di kawasan yang bertanggung jawab terhadap struktur internasional kawasan dan manajemen yang efektif.

Seiring dengan meningkatnya persaingan strategis Amerika Serikat-Tiongkok, selain dua pemain utama ini,

negara-negara kekuatan menengah (*middle power*) seperti Jepang, India, Australia, dan Indonesia harus memainkan peran yang lebih aktif untuk memastikan stabilitas kawasan Indo Pasifik. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa kawasan Asia Pasifik secara geografis luas dan beragam budaya dan politik dan oleh karena itu tidak boleh tunduk pada hegemoni unipolar atau bipolar. Di antara negara-negara kekuatan menengah, terdapat harapan yang tinggi bagi Jepang untuk mengambil peran kepemimpinan yang komprehensif di kawasan ini, terutama karena Jepang memiliki hubungan yang saling keterkaitan atau berlapis yaitu ekonomi, keamanan, dan budaya dengan negara-negara Asia Tenggara, menjadi semakin penting untuk membangun strategi geopolitik yang tidak hanya mencakup Samudra Pasifik yang berfokus pada Semenanjung Korea, Taiwan, dan Laut Cina Selatan, tetapi juga Samudra Hindia, termasuk pantai timur Afrika¹.

Pertumbuhan perdagangan dunia saat ini berkisar sekitar 12 persen. Hal ini berarti bahwa sampai taraf tertentu, tarif saat ini mungkin secara artifisial tinggi pertumbuhan yang sangat cepat dari beberapa pemain baru dalam ekonomi kawasan misalnya Tiongkok dan India. Saat ini, 60 persen perdagangan adalah intra-Asia, dan hampir setiap negara Asia Timur sekarang memiliki Tiongkok sebagai mitra dagang dominannya². Namun, saat ini bukan tentang kekuatan yang “naik” versus “yang menurun”, melainkan tentang distribusi dan pola pengaruh politik yang berubah. Faktor-faktor lain layak mendapatkan perhatian

¹ Ibid 2

² East-West Center, “ Mapping Change In The Asia Pacific Region: Geopolitics, Economics, And Diplomacy”: Senior Policy Seminar, (2007): 12

internasional yang lebih besar termasuk kebangkitan kembali Jepang dan Rusia, dan India. Meskipun bagian timur India dan sebagian pusatnya belum berpartisipasi penuh dalam kesuksesan ekonomi, India sekarang melihat populasinya sebagai aset untuk pertumbuhan³.

Beberapa tahun terakhir, hubungan ekonomi antara Jepang dan India terus berkembang dan semakin dalam. Volume perdagangan antara kedua negara telah meningkat. India adalah mitra dagang terbesar ke-21 untuk Jepang, dan Jepang adalah mitra dagang terbesar ke-12 untuk India pada tahun 2019. Selain itu, investasi langsung dari Jepang ke India telah meningkat, dan Jepang adalah investor terbesar ke-4 untuk India pada tahun fiskal 2019. Minat sektor swasta Jepang di India meningkat saat ini, sekitar 1.454 perusahaan Jepang memiliki cabang di India⁴.

India telah menjadi penerima Pinjaman ODA Jepang terbesar selama beberapa dekade terakhir. Delhi Metro adalah salah satu contoh kerja sama Jepang yang paling sukses melalui pemanfaatan ODA. Jepang terus bekerja sama dalam mendukung konektivitas strategis yang menghubungkan Asia Selatan ke Asia Tenggara melalui sinergi antara kebijakan “*Act East*” dan “*Partnership for Quality Infrastructure*”. Pada pertemuan tahun 2016, dua pemimpin negara ini menegaskan kembali komitmen untuk mensinergikan demografis India dengan modal dan teknologi Jepang untuk mewujudkan potensi kemitraan ekonomi Jepang-India

³ Ibid 5

⁴ Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Japan-India Relations (Basic Data)”, <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html> (diakses pada 10 februari 2021)

untuk masa depan. India dan Jepang kemudian menyambut baik ide untuk kemitraan melalui *Asia Africa Growth Corridor* (AAGC)⁵.

AAGC yang direncanakan bersama Jepang dan India diumumkan pada Pertemuan Tahunan ke-52 *African Development Bank* (AfDB) di Gandhinagar, India, pada 22-26 Mei 2017. Selama pengumuman tersebut, Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa baik India dan Jepang bertujuan untuk mencapai kerjasama pembangunan yang lebih dekat di Afrika⁶. Ide AAGC muncul dalam deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan Perdana Menteri Shinzo Abe pada November 2016. AAGC memiliki visi strategi pertumbuhan berkelanjutan yang berpusat pada manusia, yang detailnya akan dikembangkan melalui proses konsultasi terperinci di seluruh Asia dan Afrika, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sentralitas *people to people partnership* akan menjadi fitur unik dari inisiatif ini. Kekuatan AAGC akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan di berbagai negara dan sub-wilayah Afrika, dengan memanfaatkan homogenitas dan heterogenitas yang simultan di antara mereka. Hal ini akan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan keterkaitan antara di dalam Asia dan Afrika untuk mewujudkan kawasan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka⁷.

⁵ ibid

⁶ Jagannath Panda, “The Asia-Africa Growth Corridor: An India-Japan Arch in the Making?: Focus Asia Perspective & Analysis,” Institute for Security & Development Policy, No. 21 (No. 21 Agustus 2017): 1

⁷ Asia Africa Growth Corridor, Partnership for Sustainable and Innovative Development. A Vision Document, hal 1

Perekonomian Asia telah menunjukkan ketahanan yang kuat, sementara Afrika masih dalam perkembangan. Asia dan Afrika diharapkan berkomitmen untuk mempromosikan pertumbuhan yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan baik ditingkat nasional maupun internasional. Asia dan Afrika memiliki hubungan ekonomi historis yang dapat untuk diperdalam dan diperluas melalui AAGC. Peluang dan aspirasi Asia dan Afrika dapat dihubungkan melalui AAGC⁸.

Memperkuat hubungan antara Jepang dan India menunjukkan bahwa dinamika kawasan sedang mendefinisikan ulang terlepas dari perselisihan antara dua kekuatan global utama yaitu Amerika Serikat dan Cina. Pertanyaan umum di antara negara-negara Indo Pasifik adalah bagaimana merumuskan strategi dalam menghadapi persaingan Amerika Serikat-Tiongkok, terutama karena Tiongkok adalah mitra ekonomi yang penting bagi mereka. Menurut riset Japan External Trade Organization (JETRO), volume perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN terus tumbuh, mencapai \$ 577,4 miliar pada 2018, meningkat sekitar 250 persen dibandingkan 2008. Mengingat volume perdagangan Tiongkok secara keseluruhan tumbuh hanya 180 persen dalam periode yang sama, hubungan ekonomi yang erat antara Tiongkok dan ASEAN terlihat jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya pangsa ASEAN dari total perdagangan Tiongkok (12,6 persen pada 2018) yang terus meningkat. Negara-negara kekuatan menengah, dalam hal ini Jepang, membuat langkah strategis untuk dirinya sendiri saat Amerika Serikat dan Tiongkok bersaing untuk mendapatkan

⁸ Ibid 3

pengaruh di Indo Pasifik⁹. Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, penulis mengambil pertanyaan penelitian yaitu *Mengapa Jepang menjalin kerjasama dengan India melalui Asia Africa Growth Corridor (AAGC)?*

KERANGKA TEORI

Perspektif Neoliberalisme

Penelitian ini menggunakan sudut pandang neoliberalisme, karena penelitian ini melihat dari perspektif Indonesia sebagai negara yang ingin bergabung dalam suatu institusi kerjasama internasional. Pemikiran kaum neoliberal memang setuju bahwa sistem internasional adalah anarki, akan tetapi situasi anarki tersebut bukanlah menjadi motivasi utama sebuah negara melakukan tindakannya.

Robert Axelrod dan Robert O. Keohane (1985) menekankan pentingnya anarki yang didefinisikan sebagai ketiadaan pemerintah, tetapi berpendapat bahwa ciri politik dunia yang konstan ini memungkinkan berbagai pola interaksi antar negara. Charles Lipson mengatakan bahwa pentingnya gagasan anarki telah dibesar-besarkan oleh kaum neorealis dengan mengorbankan pengakuan pentingnya saling ketergantungan internasional. Gagasan anarki telah terlalu ditekankan sementara saling ketergantungan telah diabaikan¹⁰.

Neoliberalisme berpendapat bahwa ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan sering membentuk

⁹ Op, cit Hiroyuki Suzuki

¹⁰David A. Baldwin, Neoliberalism, Neorealism, And World Politics. hal.4

institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan dengan mengurangi biaya. Neoliberal melihat 'institusi' sebagai mediator dan sarana untuk mencapai kerjasama antara aktor-aktor dalam system internasional. Saat ini, neoliberal institusional memfokuskan penelitian pada isu-isu global governance dan pemeliharaan institusi yang terkait dengan proses globalisasi¹¹.

Teori Kebijakan Luar Negeri

Untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara maka sebuah negara perlu untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Kebijakan yang diterapkan harus memenuhi semua kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional negaranya. Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *foreign policy* merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional¹².

Analisis fenomena politik luar negeri terdiri dari orientasi pada kebijakan dengan situasi tertentu yang dihadapi oleh suatu negara tertentu. Untuk tujuan analisis, konsep politik luar negeri dipahami terdiri dari pernyataan dan tindakan yang diambil oleh suatu

negara yang tunduk pada hubungannya dengan aktor eksternal lainnya, negara atau aktor non-negara. Hal ini responsif terhadap tindakan negara lain dan diambil untuk memenuhi kepentingan nasional di luar batas teritorial. Politik luar negeri merupakan kelanjutan dari politik dalam negeri karena melayani dan mencerminkan kepentingan nasional.

James N. Rosenau mengkategorikan faktor-faktor/sumber-sumber politik luar negeri melalui dua kontinum, yakni dengan cara menempatkan sumber-sumber itu pada kontinum waktu (*time continuum*) dan kontinum agregasi sistematis¹³. Kontinum waktu meliputi sumber-sumber yang cenderung bersifat terus menerus dan tetap (*sources that tend to change slowly*) dan sumber-sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jarak pendek (*shortterm fluctuations*), dan sumber-sumber yang dapat berubah (*sources that tend to undergo rapid change*).

Sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri, yaitu: Sumber sistemik (*systemic sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan di antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk diantara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis. Yang dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar adalah jumlah negara besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana pembagian kapabilitas di antara mereka. Sementara faktor situasional eksternal

¹¹Beutari Octaviani, Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force(Fatf) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Indonesia, *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2015, hal. 30-34.

¹² Anak Agung Banyu Perwita, dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 47.

¹³ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 18.

merupakan stimulan tiba-tiba yang berasal dari situasi internasional terakhir.

Sumber masyarakat (*societal sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik. Kebudayaan dan sejarah mencakup nilai, norma, tradisi, dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antara anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan sendiri. Hal ini dapat mendasari kepentingan negara tersebut untuk berhubungan dengan negara lain. Struktur sosial mencakup sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara atau seberapa besar konflik dan harmoni internal dalam masyarakat. Opini publik juga dapat menjadi faktor dimana penstudi dapat melihat perubahan sentimen masyarakat terhadap dunia luar.

Sumber pemerintahan (*governmental sources*), merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal. Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional

dan tujuan nasional yang hendak dicapai¹⁴.

Studi tentang politik internasional adalah studi yang sangat luas dan kompleks. Studi ini mencakup analisis sifat politik, komponen kekuatan politik, alternatif utama kebijakan dalam urusan internasional, dan batasan yang dapat mengurangi pilihan kebijakan luar negeri apakah batasan ini intrinsik pada proses politik kekuasaan itu sendiri atau apakah mereka diperkenalkan khusus untuk tujuan membatasi interaksi dari politik kekuasaan, misalnya, hukum internasional, organisasi, dan moralitas. Meskipun ada banyak kemungkinan tipologi, yang paling umum digunakan adalah membagi instrumen kebijakan luar negeri menjadi politik, ekonomi dan militer. Secara tradisional, instrumen politik internasional dapat dikategorikan sebagai diplomasi, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi¹⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEPENTINGAN KERJASAMA JEPANG DENGAN INDIA MELALUI AAGC

Sumber Sistemik: Mengimbangi Strategi Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok Melalui Free and Open Indo-Pacific Strategy

Strategi FOIP diprakarsai oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada Agustus 2016¹⁶. Strategi ini adalah visi

¹⁴ Ibid 15

¹⁵ William V. O'Brien. Instruments Of International Politics. Can we discover ethical strictures in the practical, political order? https://carnegiecouncil-media.storage.googleapis.com/files/v06_i005_a002.pdf

¹⁶ Yasuhisa Kawamura, "The Free And Open Indo-Pacific: Charting a Common Approach," Speech by Ambassador Yasuhisa Kawamura, January 22, 2020, <https://www.ca.emb->

yang menentukan ritme kerja sama internasional Jepang di kawasan di mana stabilitas sangat penting bagi keamanan dan ekonomi Jepang. FOIP berupaya menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan ASEAN sebagai “engsel” di antara keduanya. Konsep “bebas dan terbuka” terutama mengacu pada aturan hukum, kebebasan navigasi, dan perdagangan bebas¹⁷. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, FOIP sering ditafsirkan sebagai tindakan balasan terhadap BRI Tiongkok. Paling tidak karena tumpang tindih dengan BRI Tiongkok dan karena menekankan kebebasan, keterbukaan, dan non-kekerasan, sehingga berusaha membedakannya dari BRI yang sering tidak transparan dan tidak layak secara ekonomi¹⁸. Konsep ini juga digunakan oleh negara-negara lain yang peduli dengan keagresifan Tiongkok, terutama AS, India, dan Australia¹⁹.

Seperti yang diumumkan tepat setelah pertemuan Belt and Road Forum di Tiongkok, yang diadakan pada 14-15 Mei 2017 di Beijing, AAGC sering

dianggap sebagai tindakan balasan terhadap BRI Tiongkok, terutama karena India memutuskan untuk mendukung visi liberal, tatanan berbasis nilai dan untuk mendukung Strategi FOIP yang diresmikan oleh Perdana Menteri Abe pada Agustus 2016. Beberapa media India dan Jepang menganggap AAGC sebagai alternatif dari Tiongkok, dan beberapa media Tiongkok menyebut AAGC sebagai contoh kecemasan strategis India tentang Tiongkok. India memang satu-satunya negara di sepanjang *Belt and Road* yang tidak mengirim delegasi ke Forum *Belt and Road* di Beijing. Beberapa peneliti juga menyimpulkan bahwa pengaruh Tiongkok yang berkembang di Afrika mengkhawatirkan India dan Jepang dan mendorong mereka untuk bekerja sama dan menciptakan gagasan AAGC²⁰.

Seperti BRI, FOIP sebagian besar berfokus pada infrastruktur, dengan *The Partnership for Quality Infrastructure* Jepang, yang diluncurkan pada tahun 2015, sebagai intinya. Fokus pada aspek kualitas adalah cara lain untuk membedakan upaya Jepang dari BRI, dengan alasan efisiensi ekonomi dan pertimbangan ekonomi lokal sebagai bagian dari esensinya²¹. Hal ini membuat Jepang menjadi alternatif kompetitif bagi BRI.

Inisiatif *The Partnership for Quality Infrastructure*, bersama dengan Asia Development Bank (ADB), pada tahun 2015 berkomitmen untuk menyediakan investasi infrastruktur

japan.go.jp/2020_shared_images/Speech_at_Vancouver_FOIP_Conference.pdf, (diakses pada 1 september 2021)

¹⁷ Japan's Ministry of Foreign Affairs, Free and Open Indo-Pacific, https://www.mofa.go.jp/policy/page25e_000278.html, (diakses pada 1 september 2021)

¹⁸ Jonathan E. Hillman, “China's Belt and Road Initiative: Five Years Later,” Center for Strategic and International Studies, 2018, <https://www.csis.org/analysis/chinas-belt-and-road-initiative-five-years-later-0>, (diakses pada 1 september 2021)

¹⁹ “‘Free and Open Indo-Pacific’: US, Australia, India, Japan to discuss China's growing power,” *The Economic Times*, 2020, <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/free-and-open-indo-pacific-us-australia-india-japan-to-discuss-chinas-growing-power/articleshow/78506756.cms?from=mdr>, (diakses pada 1 september 2021)

²⁰ Takuya Taniguchi, “Should We Forget about the Asia-Africa Growth Corridor?,” *Lettre du Centre Asie*, No. 87, Ifri, 19 October 2020: 87

²¹ Japan's Ministry of Foreign Affairs, Partnership for Quality Infrastructure, <https://www.mofa.go.jp/files/000117998.pdf>, (diakses pada 3 September 2021)

sebesar 110 miliar USD di Asia antara tahun 2016 hingga 2020 dan selanjutnya diperluas menjadi 200 miliar USD pada tahun 2016 untuk didistribusikan di seluruh dunia²². Konsep infrastruktur berkualitas juga telah digunakan dalam berbagai konfigurasi dengan aktor internasional lainnya. Mengingat jangkauan global dan perannya sebagai langkah penyeimbang ke Tiongkok, adalah relevan untuk meninjau aktivitas Jepang di wilayah di mana infrastruktur berkualitas dan lainnya kebijakan ekonomi bersaing dengan BRI. Strategi investasi dan kebijakan Jepang serta dampaknya bervariasi antar wilayah, seperti halnya BRI Tiongkok.

Afrika juga memainkan peran besar dalam strategi FOIP dan penentangan Jepang terhadap Tiongkok. Sejak 2017, India dan Jepang telah berkolaborasi dalam mengembangkan *Asia Africa Growth Corridor* (AAGC). AAGC digambarkan sebagai rute maritim yang menyaingi “Jalan Sutra Maritim” Tiongkok, menghubungkan dua benua dengan pelabuhan: di Jamnagar, India, dengan Djibouti, dan pelabuhan di dekat Madurai, India, dengan pelabuhan di Mombasa dan Zanzibar; tetapi juga dengan mengembangkan infrastruktur di dalam kutub pertumbuhan mereka²³.

Mengingat potensi pembangunan Afrika dan benua menjadi target utama BRI, tidak mengherankan bahwa Jepang akan berusaha untuk mengambil bagian

²² Hiroto Izumi, “Quality Infrastructure Investment: Global Standards and New Finance”, Presentation at the First International Economic Forum on Asia, April 14, 2017, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000252520.pdf>, (diakses pada 3 September 2021)

²³ Andreea Brînză, “Japan’s Belt and Road Balancing Act,” *The Diplomat*, November 8, 2018, <https://thediplomat.com/2018/11/japans-belt-and-road-balancing-act/>, (diakses pada 3 September 2021)

dalam “perebutan Afrika” saat ini²⁴. Pada Konferensi Internasional Tokyo tentang Pembangunan Afrika (TICAD) ketujuh pada tahun 2019, Jepang menjanjikan paket pembiayaan 20 miliar USD ke Afrika. Sementara versi Tiongkok tahun sebelumnya sebesar 60 miliar USD tiga kali lebih besar, ini menunjukkan bagaimana Jepang berusaha mengurangi jejak ekonomi dan infrastruktur Tiongkok di Afrika. Namun, inferioritas ekonomi Jepang terhadap Tiongkok menghalangi persaingan yang lebih merata. Abe mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir Jepang melihat 20 miliar USD investasi dan ODA ke Afrika, gagal memenuhi janji 2016 sebesar 30 miliar USD dengan margin yang cukup besar. Keengganan untuk berinvestasi di Afrika antara perusahaan Jepang menjadi kendala dalam pencapaian target. Hal ini membuat masuknya investasi Jepang di kawasan ini bergantung pada institusi pemerintah Jepang²⁵.

Sementara Jepang memberikan pilihan yang lebih mahal daripada Tiongkok, Jepang memiliki citra yang umumnya lebih menguntungkan dengan pengakuannya sebagai opsi “kualitas”, dan tingkat bunga pinjaman Tiongkok seringkali tiga kali persentase dari pinjaman Jepang²⁶. Namun, Jepang

²⁴ Dylan Yachyshen, “Great Power Competition and the Scramble for Africa,” *Foreign Policy Research Institute*, April 30, 2020, <https://www.fpri.org/article/2020/04/great-power-competition-and-the-scramble-for-africa/>, (diakses pada 3 September 2021)

²⁵ Brendon J. Cannon, “Japan’s Indo-Pacific: Operationalizing Tokyo’s vision in eastern Africa,” dalam *Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific: New Geopolitical Realities*. (London: Routledge, 2020) : 121

²⁶ J. Cannon & Hirotaka Fujibayashi, “The Political Economy of Japan’s Relationship with East Africa: A Case Study of Kenya”, <http://web.isanet.org/Web/Conferences/HKU2017->

perdagangan dengan Afrika pada tahun 2018 hanya mencapai setengah dari tingkat tahun 2008, sebesar 17 miliar USD, jauh di belakang Tiongkok yang sebesar 200 miliar USD dan Jepang, oleh karena itu, memiliki sedikit peluang untuk bersaing dengan Tiongkok di Afrika sendiri²⁷.

Berdasarkan pada perdagangan Tiongkok ke kawasan yang kira-kira sepuluh kali lebih besar dari Jepang, dan lokasi periferal Afrika di FOIP, tidak aneh jika Jepang tidak memiliki banyak hal untuk ditunjukkan. Alternatif “kualitas” Jepang masih tetap menjadi produk mewah bagi banyak negara dan bersaing dengan BRI dalam infrastruktur di kawasan ini. Namun, melihat ekonomi Jepang sepertiga dari Tiongkok, paket pembiayaan Jepang ke kawasan juga menjadi sepertiga dari Tiongkok yang menunjukkan bukan hanya upaya untuk mengungguli Tiongkok, tetapi untuk mengambil inisiatif untuk diikuti oleh negara lain. Dengan demikian, Jepang memimpin jalan bagi penyedia infrastruktur yang lebih beragam.

Setiap aksi mempunyai reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Untuk menerapkan logika ini pada hubungan Internasional, meskipun efeknya tidak dapat dinilai dalam derajat, tetapi beberapa hubungan dapat ditarik ke cara suatu negara berperilaku terhadap negara lain dalam hal penyeimbangan. Geometri politik kekuasaan semacam ini dapat diuji dengan menyamakan AAGC India-Jepang dengan BRI Tiongkok, di

mana penyeimbang yang kuat sedang dimainkan. Alih-alih menerapkan politik *hard power*, aspek penting lainnya terlihat dari meningkatnya persaingan di bidang infrastruktur. Mengingat hal ini, salah satu aspek kunci AAGC terlihat dalam kolaborasi bersama India-Jepang dalam investasi infrastruktur. Hal ini didorong oleh tujuan pembangunan dan kerjasama kedua negara dalam membangun infrastruktur dan konektivitas kelembagaan yang berkualitas.

Konvergensi tujuan strategis antara Jepang dan India adalah kekhawatiran yang membayangi atas kebangkitan Tiongkok dan ambisi Tiongkok yang berkembang. Baik Jepang ataupun India menghadapi tantangan Tiongkok dalam hal sengketa kedaulatan teritorial dan isu-isu maritim seperti sengketa perbatasan India-Tiongkok yang belum terselesaikan dan sengketa pulau-pulau Diaoyu/Senkaku di Laut China Timur, kemudian secara bertahap Tiongkok berangsur ke Samudera Hindia seperti pembentukan militer luar negeri di pangkalan di Djibouti, dan kekuatan Cina yang meningkat di Laut Cina Selatan. Dengan kekuatan seperti itu, Jepang dan India bertekad untuk melawan tantangan Tiongkok, sehingga mendiversifikasi ruang lingkup hubungan ekonomik yang telah lama mereka pegang menjadi kemitraan strategis.

Namun, yang secara signifikan membuat bingung Jepang dan India adalah rencana besar BRI Tiongkok yang bertujuan untuk menghubungkan Asia ke Eropa dan Afrika melalui *New Silk Road*. Tiongkok ingin menggunakan inisiatif ini untuk mencari pengaruh dan dominasi di Asia, sehingga meningkatkan kekhawatiran keamanan yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

s/Archive/a0cd0ea2-06f6-4bc5-af88-2a7f9bd6fdce.pdf, (diakses pada 3 September 2021)

²⁷ William Pesek, “Abe’s African pitch short on muscle, creativity,” Asia Times, September 11, 2019, <https://asiatimes.com/2019/09/abes-african-pitch-short-on-muscle-creativity/>, (diakses pada 3 September 2021)

pembangunan infrastruktur di sepanjang “*Belt and Road*” melibatkan dimensi militer dan keamanan. Sebagai contoh, pangkalan militer angkatan laut luar negeri pertama Tiongkok yang baru-baru ini diluncurkan di Djibouti mencerminkan dimensi militer BRI. Pangkalan ini akan memfasilitasi kemampuan Tiongkok untuk menanggapi kemungkinan yang mempengaruhi kebebasan navigasi di dalam dan sekitar Teluk Persia, yang sebagian besar dikendalikan oleh Amerika Serikat²⁸.

Selain itu, Tiongkok dapat memperluas kemampuan penolakan lautnya yang terdiri dari penempatan kapal selam di Samudera Hindia dan kemampuan anti akses/area penolakan strategis (A2/AD) dan dengan demikian memperkuat pijakannya di Samudera Hindia melalui BRI. Mengingat hal ini, kurangnya transparansi niat Tiongkok mengakibatkan spekulasi kuat yang diajukan oleh negara-negara seperti India, Jepang dan Amerika Serikat. Yang terpenting bagi Jepang, India telah memberikan perlawanan yang kuat terhadap rencana BRI Tiongkok dan menahan diri untuk tidak bergabung dengan inisiatif tersebut²⁹.

Dengan visi bersama ini, di bawah AAGC, Jepang dan India bertujuan untuk membangun koridor laut melalui Samudra Hindia yang akan mengintegrasikan ekonomi Asia Selatan, Tenggara dan Timur dengan Oseania dan Afrika. Di sini, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dengan menemukan kembali rute laut kuno dan

menciptakan koridor laut baru yang akan menghubungkan benua Afrika dengan India dan negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Sedangkan secara praktis, AAGC merupakan peluang bagi Jepang dan India. Artinya, Jepang sebagai negara yang miskin sumber daya dapat memperoleh manfaat dari sumber daya alam Afrika yang luas; India kaya akan cadangan mineral, tetapi bahan bakar fosil tidak mencukupi yang dapat diambil dari Afrika untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan ukuran populasinya³⁰. Selain itu, proyek AAGC juga menyediakan mekanisme pembangunan alternatif untuk Afrika, menyeimbangkan BRI Tiongkok yang menimbulkan tingginya utang di berbagai negara

Sumber Masyarakat: India Sebagai Batu Loncatan Ke Pasar Afrika

Agenda Jepang dan India mengenai promosi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas baik di dalam India dan di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas telah dimulai. Agenda ini mendukung tujuan strategis untuk membantu India mengintegrasikan kembali Asia Timur sambil mengimbangi pengaruh Tiongkok yang tumbuh di kawasan itu, melalui tiga pilar: tumbuhnya sinergi antara visi besar India dan Jepang untuk kawasan itu; mempromosikan investasi Jepang di negara bagian India yang sensitif secara strategis, dan upaya untuk

²⁸ Amrita Jash, *India and Japan: Growing Partnership and Opportunities for Co-operation*, (CPPR- Centre for Public Policy Research, 2019), 11

²⁹ *ibid*

³⁰ Richter, Frank-Jürgen. 2018. *The alternative to Chinese debt for Africa from Japan and India*. Nikkei Asian Review, <https://asia.nikkei.com/Opinion/The-alternative-to-Chinese-debt-for-Africa-from-Japan-and-India>, (diakses pada 3 September 2021)

mempromosikan investasi bersama di negara ketiga, terutama di Afrika.

Ambisi Jepang semakin jelas setelah Perdana Menteri Abe meluncurkan Strategi FOIP. Dalam strategi ini, Jepang dengan jelas menyatakan ambisinya untuk mempromosikan konektivitas di kawasan Indo-Pasifik serta kerja sama keamanan maritim, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai liberal. Strategi FOIP dengan demikian merupakan upaya untuk mengusulkan alternatif proyek BRI Tiongkok dan menawarkan opsi pendanaan infrastruktur lainnya ke negara-negara di kawasan itu, untuk membantu mereka menghindari Tiongkok. FOIP juga mengusulkan narasi geopolitik alternatif untuk Jalur Sutra Baru, memberikan lebih banyak visibilitas ke aktivitas Jepang yang sudah banyak di kawasan Indo Pasifik, dan menarik perhatian dan kerja sama negara-negara lain.

Karena Jepang tidak dapat bersaing dengan Tiongkok dalam mendanai pembiayaan infrastruktur, Jepang lebih mengedepankan penawarannya pada aspek kualitas, transparansi, dan kepatuhannya terhadap standar sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, Jepang mengandalkan program *Partnership for Quality Infrastructure* dengan alokasi USD 110 miliar selama lima tahun, bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB), untuk mendanai infrastruktur di Asia Selatan dan Tenggara. Prinsipnya adalah untuk memfasilitasi investasi berisiko lebih tinggi dengan melonggarkan proses untuk memperoleh pinjaman dan hibah, dan memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar sehubungan dengan kondisi seperti negara penerima yang menjamin kemampuannya untuk membayar kembali

pinjaman. Fokus pada bagian "kualitas" dari penawaran infrastruktur juga membantu Jepang untuk memberikan pinjaman terikat dan penggunaan teknologi dan konstruksi Jepang dalam melaksanakan program ODA³¹.

Di bawah agenda bersama ini, kerja sama antara Jepang dan India telah mulai berkembang ke beberapa arah: pertama, Jepang mendanai infrastruktur di Timur Laut India, dan menjajaki peluang pendanaan potensial di Kepulauan Andaman dan Nicobar; kedua, membentuk AAGC untuk mempromosikan investasi bersama di Afrika. Strategi hubungan luar negeri yang proaktif ini memposisikan India sebagai calon mitra dalam tatanan regional yang berkembang. Posisi Abe tentang kepentingan India dan Jepang yang berkembang dalam kerangka "Asia yang lebih luas" terutama didasarkan pada empat alasan. Pertama, meningkatkan *positioning* Jepang di ranah maritim di Kawasan Samudera Hindia (IOR); kedua, untuk meningkatkan visi kepemimpinan Jepang bersama dengan India dalam kerangka regional dan global, bermitra dengan Amerika Serikat dan Australia; dan ketiga, untuk meningkatkan pemahaman keamanan bilateral Jepang dengan sejumlah negara di luar mitra aliansinya yang kuat, Amerika Serikat; dan keempat, untuk mencari jalan baru bisnis dan perdagangan, yang bertujuan untuk memperluas kepentingan bisnis Jepang di India³².

³¹ Céline Pajon dan Isabelle Saint, "The Japan-India Economic Partnership. A Politically Driven Process," Ifri Center for Asian Studies (2018): 30

³² *ibid*

Sumber Pemerintah: Strategi Hubungan Luar Negeri Proaktif Shinzo Abe

Suara negara-negara Afrika penting bagi reformasi PBB yang telah lama dijunjung Jepang yang memiliki niat untuk memperluas keanggotaan Dewan Keamanan dan menjadi anggota tetap. Saat ini, tidak hanya hubungan politiknya tetapi juga hubungan ekonominya menjadi penting bagi Jepang. Setidaknya sejak 2013, pemerintahan Abe telah memprioritaskan pemberian insentif pada investasi swasta di benua Afrika untuk mengamankan sumber daya energi dan akses ke pasar yang berkembang. Jumlah perusahaan Jepang yang melakukan bisnis di Afrika telah meningkat 1,5 kali dibandingkan tahun 2010. Dengan demikian Afrika merupakan kawasan penting bagi Jepang dan India, dan mereka telah mendiskusikan Kerjasama Triangular mereka dalam dialog India-Jepang di Afrika sejak 2010³³.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah sumber kebijakan luar negeri Jepang dalam kepentingan bekerjasama dengan India melalui AAGC adalah pertama, sumber sistemik menjelaskan bahwa pertimbangan terhadap strategi *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok adalah melalui *Free and Open Indo-Pacific Strategy* oleh Jepang. Kedua, sumber masyarakat yaitu melihat India sebagai batu loncatan ke pasar Afrika. Ketiga, sumber pemerintah yaitu strategi hubungan luar negeri proaktif Shinzo Abe terhadap India.

³³ ibid

AAGC bertujuan pada strategi Jepang untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Aliansi ini akan menjadi jalur laut yang menghubungkan Afrika dengan India dan negara-negara lain di Oseania dan Asia Tenggara dengan menghidupkan kembali rute laut lama dan akan menghubungkan pelabuhan di Jamnagar di Gujarat dengan Djibouti di Teluk Eden dan juga pelabuhan Zanzibar dan Mombasa akan dihubungkan dengan pelabuhan dekat Madurai. Pelabuhan Sittwe di Myanmar akan dihubungkan dengan pelabuhan Kolkata. Jepang dan India percaya bahwa aliansi AAGC akan menjadi alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan dengan BRI Tiongkok.

Tidak hanya sebagai *counterbalance* terhadap kebangkitan Tiongkok melalui BRI, AAGC juga mampu menopang kepentingan bisnis Jepang dalam ekspansi pasar ke Afrika. India dan Jepang masih perlu meningkatkan hubungan bisnis untuk memberi lebih banyak substansi pada kemitraan bilateral. Jepang dan India sangat ingin mengembangkan kemitraan mereka sebagai tindakan penyeimbang vis-à-vis Tiongkok.

Referensi

Arjun Asrani, "India-Japan Relating— Looking Back, Looking Ahead," *Gendai Indo Forum* [Contemporary India Forum], Winter Issue No. 12:118

Amrita Jash, *India and Japan: Growing Partnership and Opportunities for Co-operation*, (CPPR- Centre for Public Policy Research, 2019)

Asia Africa Growth Corridor,

Partnership for Sustainable and Innovative Development. A Vision Document

Brendon J. Cannon, "Japan's Indo-Pacific: Operationalizing Tokyo's vision in eastern Africa," dalam *Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific: New Geopolitical Realities*. (London: Routledge, 2020)

Catherine Marshall dan Gretchen B Rossman, 1994. *Designing Qualitative Research 2nd Edition*. California: Sage Publication

Céline Pajon dan Isabelle Saint, "The Japan-India Economic Partnership. A Politically Driven Process," *Ifri Center for Asian Studies* (2018)

David Scott. "India's Drive for a Blue Water Navy," *Journal of Military and Strategic Studies*, vol 10 Issue 2 Winter 2007-2008

Kafarneh, A. A, "Decision making in foreign policy," *Journal of Law, Policy and Globalization* Vol.10 no.1 (2013)

East-West Center, "' Mapping Change In The Asia Pacific Region: Geopolitics, Economics, And Diplomacy': Senior Policy Seminar, (2007)

Jagannath Panda, "'The Asia-Africa Growth Corridor: An India-Japan Arch in the Making?': Focus Asia Perspective & Analysis," *Institute for Security & Development Policy*, No. 21 (No. 21 Agustus 2017)

Céline PAJON, Isabelle SAINT-MEZARD, "Asia-Africa Growth Corridor at the crossroads of business and

geopolitics": *East Asia Forum*," 8 November 2018

Pooja Bhatt, "Evolving Dynamics in the Indo-Pacific Deliberating India's Position," *Journal of Indo-Pacific Affairs* (Fall 2018)

R.S. Yadav, "Changing India-Japan Relations In The Post-Cold War Era," *India Quarterly* 82, Vol. 58, No. 2 (April - June, 2002)

Stephen Walt, *The Origins of Alliances: Exploring Alliance formation*, (NY: Cornell University Press, 1987)

Stephen Walt , "Alliance Formation and the Balance of World Power", *International Security* 9 (4), (1985)

T.V. Paul, James J. Writz, dan Michael Fortman, "*Balance of Power Theory and Practice in 21st Century*", (Stanford: Stanford University Press, 2004)

Derek McDougall, "Responses to 'Rising China' in the East Asian Region: soft balancing with accommodation," *Journal of Contemporary China* 21, no. 73 (January 2001)

Xing, Y., "Analysis of Political Decision-Making and Its Influencing Factors," *Journal Cross-Cultural Communication* Vol. 11, No. 3 (2015)